



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



SEKRETARIAT DPRD KAB. KEP SELAYAR

Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Benteng
Telp. (0414) 21714 No. Faks. (0414) 21097
Kab. Kepulauan Selayar 92812

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2023 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar baik yang telah berhasil mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun yang belum mencapai target.

Kami berharap Laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Sekretaris DPRD

Kabupaten Kepulauan Selayar



MASDAR J PRATAMA, S.Kom,MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 198406022010011012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	2
D. Isu-Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Indikator Kinerja Utama.....	14
C. Rencana Kinerja Tahunan.....	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Kinerja.....	27
B. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	31
C. Realisasi Keuangan	51
BAB IV PENUTUP.....	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Sekretariat DPRD 2021-2026	13
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD	14
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.....	16
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 2.6 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	25
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.	26
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.	26
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	31
Tabel 3.3 Target dan Realisasi kinerja tahun 2023.....	32
Tabel 3.4 Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akip Sekretariat DPRD TA 2022	33
Tabel 3.5 Target dan Realisasi kinerja Tahun Sebelumnya 2021	34
Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Terhadap Capaian Periode Akhir Renstra.....	35
Tabel 3.7 Target dan Realisasi kinerja tahun 2023.....	35
Tabel 3.8 Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Pendukung Sasaran 1	35
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Sasaran 2.....	39
Tabel 3.10 Penyelarasan / Pengintegrasian Program Kerja DPRD Ke dalam Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD TA 2023	40
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 indikator 1	44
Tabel 3.12 Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda Yang Ditetapkan Tahun 2023	52

Tabel 3.13 Penilaian Quisisioner Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	52
Tabel 3.14 Perhitungan Penilaian Quisisioner Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	54
Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi pada tahun sebelumnya	56
Tabel 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi sampai pada akhir periode renstra	56
Tabel 3.17 Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Pendukung Sasaran 1	57
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran TA 2023 Berdasarkan Peruntukannya	60
Tabel 3.19 Capaian Realisasi Anggaran TA 2023 Menurut Program, dan Sub Kegiatan Tahun 2023	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	3
Gambar 2.1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar.....	12

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Selayar tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 (Satu) : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah

Sasaran 1 (satu) didukung oleh 2 program dan 42 sub kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi dan capaian 100% yang diperoleh dari komitmen dan kerja sama dari masing-masing pihak yang terlibat, meskipun terdapat 1 sub kegiatan yakni Fasilitasi Fraksi DPRD difocusing karena mempertimbangkan keadaan anggaran dan kepentingan pelaksanaan sub kegiatan/kegiatan. Pencapaian sasaran 1 juga didukung oleh 2 (dua) indikator, yakni:

- a. Nilai SAKIP SKPD Tahun 2022 dengan kategori kurang atau predikat B (61,35) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP;
- b. Laporan Keuangan yang sesuai SAP tahun 2023 telah sesuai SAP dan mencapai target.

2. Sasaran 2 (dua) : Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

Sasaran 2 (dua) didukung oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri dari 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi dan capaian 100%, hal ini didukung dengan adanya kerjasama yang baik antar berbagai pihak. Pencapaian sasaran 1 juga didukung oleh 2 (dua) indikator, yakni:

- a. Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu memperoleh realisasi 100% telah memenuhi target dengan kriteria realisasi sangat tinggi dan menghasilkan 11 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan T.A. 2023.
- b. Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap layanan Sekretariat telah memenuhi target dengan nilai 80 dengan persentase capaian 114% dengan kategori sangat tinggi

3. Realisasi anggaran sebesar Rp 31.550.339.937 atau 99,17%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 264.866.314 atau 0,83%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah terkait hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaan hak, wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah diperlukan adanya suatu pertanggungjawaban dan pengawasan untuk menghindari bias-bias penyalahgunaan kewenangan. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and clean government*), bertanggung jawab, efektif dan efisien.

Dasar hukum penyusunan LAKIP diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan informasi terkait apa yang seharusnya dicapai yakni terkait tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan apa yang telah dicapai dari tujuan, sasaran kinerja yang telah direncanakan pada tahun anggaran tersebut. Selain daripada transparansi informasi, LAKIP memberikan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa tujuan pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Maksud dari penyusunan LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Selayar secara manajerial kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat),

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah :

1. Memberikan informasi mengenai kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Merupakan media evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang dan merupakan media dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

C. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan dalam hal administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026, Sekretariat DPRD sesuai perda No. 4 tahun 2020, mempunyai tugas dan fungsi “*Sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.*”

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD dibantu oleh pejabat struktural eselon III, yaitu Kepala Bagian, dan eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian, dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang membawahi tiga bagian, yakni:

- a. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - Sub. Bagian Program dan Keuangan;
 - Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
- b. Bagian Pengawasan dan Penganggaran terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2023

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “*Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD*”. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan serta pemberian dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Sekretariat DPRD dan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat DPRD dan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD di bidang legislasi;
- Penyelenggaraan dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan pengawasan; dan
- Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan Fungsinya.

b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

- Sub bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan Fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD di bidang Pembentukan Peraturan Daerah.

d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan Fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komposisi Sumber Daya Aparatur

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar **per 31 Desember 2023** didukung oleh sumber daya aparatur ASN sebanyak 27 (dua puluh tujuh orang). Berikut kualifikasi jabatan Pegawai lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan

No	Jabatan	Formasi	Pegawai Yang Ada	Kekurangan
1	2	3	4	5
A	Jabatan Struktural			
1.	Sekretaris DPRD	1	1	0
2.	Kabag Umum dan Keuangan	1	1	0
3.	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1	1	0
4.	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1	1	0
5.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum	1	1	0
6.	Kasubbag Program dan Keuangan	1	1	0
B.	Jabatan Fungsional Tertentu			
1.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	3	3	0
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	1	2
C.	Jabatan Pelaksana			

1.	Penelaah Teknis Kebijakan	12	6	6
2.	Pengadministrasi Perkantoran	7	7	0
3.	Penata Layanan Operasional	4	4	0
Jumlah		34	27	8

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2023

Sumber Daya Aparatur adalah salah-satu faktor yang menunjang kinerja suatu instansi. Dari Tabel 1.1. di atas dapat dilihat bahwa dari 34 formasi yang dibutuhkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang terpenuhi hanya 27 Pegawai, masih terdapat 8 kekurangan pegawai dengan spesifikasi jabatan yang berbeda-beda. Adanya kekurangan sumber daya pada Sekretariat DPRD mengakibatkan *job desk* dari suatu jabatan dikerjakan oleh pihak yang bukan pada bidangnya sehingga selain beban kerja yang tumpang tindih, kualitas dari *output* yang dihasilkan juga masih rendah. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja adalah dengan memenuhi formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

a. Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Gedung Sekretariat DPRD dengan luas bangunan ±940 m², terdiri dari 5 gedung yakni:

1. Tiga gedung operasional kantor yang terdiri dari 1 gedung tempat Ibadah, dan 1 gedung Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.Kep. Selayar. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Gedung A terdiri dari 2 lantai;
 - Gedung B terdiri dari 3 lantai;
 - Gedung C terdiri dari dua lantai.
2. Satu gedung tempat ibadah. Keadaan gedung tempat ibadah Sekretariat DPRD atau musholla saat ini mengalami kerusakan pada bagian atap, hal ini disebabkan selain dari pada gedung yang telah ada sejak lama, juga disebabkan oleh faktor cuaca yang mempengaruhi kerusakan dari atap bangunan mushola.
3. Satu gedung Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.Kep. Selayar.

b. Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi

a. Sarana Transportasi

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD per 31 Desember 2023 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

Kendaraan roda empat Pimpinan DPRD	: 3 unit
Kendaraan roda empat Sekretariat DPRD	: 2 unit
Kendaraan roda 2	: 34 unit

b. Sarana Pendukung Lainnya

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Wifi/Jaringan Internet, CCTV, Laptop, komputer, Printer, LCD, Sound, AC , Kulkas dan sarana pendukung lainnya yang menunjang kinerja dari Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD.

Secara umum Sekretariat DPRD telah memiliki sarana dan prasarana yang telah mencukupi dari segi kuantitas namun perlu ditingkatkan dalam hal kualitas baik dari gedung, transportasi maupun sarana pendukung lainnya. Pemeliharaan/perbaikan gedung dengan kualitas yang baik sangat perlu untuk diperhatikan karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan dari pemberi layanan maupun yang diberi layanan. Selain dari gedung, pemeliharaan sarana transportasi dan sarana pendukung lainnya sangat diperlukan dalam meninjau sarana yang masih layak ataupun tidak layak untuk digunakan dan yang perlu untuk diperbaiki. Permasalahan sarana prasarana yang telah dijelaskan dapat terselesaikan dengan adanya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pemberian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan/perbaikan/penggantian sarana dan prasarana, dan juga komitmen dari penanggung jawab dan rekanan untuk memberikan kualitas yang baik dan layak.

D. Isu-Isu Strategis

Sekretariat DPRD memiliki dua tanggung jawab yakni secara administratif dan operasional. Secara administratif Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan secara operasional Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD perlu untuk menyeimbangkan kedua tanggung jawab tersebut dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD. Sebagai lembaga birokrasi, Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada

DPRD dituntut untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan harus memiliki mentalitas kuat dan kemampuan untuk mengakomodir kepentingan dalam mendukung kinerja DPRD.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sehingga diperlukan kemampuan untuk mengenali serta merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu-isu Strategis ditetapkan melalui analisa lingkungan kerja berupa faktor eksternal dan internal untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya yang dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Adapun yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi:

- Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dalam hal kuantitas dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
- Dinamika politik mempengaruhi kinerja sehingga menuntut mentalitas yang kuat dalam mengakomodir berbagai kepentingan semua pihak;
- Kualitas dari Sumber Daya Aparatur masih rendah dalam hal kesadaran akan tanggung jawab dan disiplin kerja, terdapat beberapa aparat yang masih lalai terhadap tanggung jawabnya dan memberikan beban kerja kepada pihak lain;
- Keterbatasan anggaran dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dan maksimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, Rencana Strategis Sekretariat DPRD dirumuskan dan ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari perencanaan sebelumnya dan melakukan pembaharuan/perubahan apabila terdapat hal yang perlu untuk diperbaharui mengikuti ketentuan dan peraturan terbaru.

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, kemudian dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah menjadi dasar dilaksanakannya koordinasi, konsultasi dan asistensi dalam melakukan perubahan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dari hasil konsultasi terkait Perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Adapun yang termuat dalam Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD dan demi mendapatkan perencanaan yang baik, dapat dikelola, selaras dengan manajemen pemerintah daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021 - 2026, dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024 , Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Mandiri, RPJMD 2016-2021, Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 , dan RPJPD Kab Kepulauan Selayar 2005 – 2025 adalah Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, mandiri dan berkelanjutan maka Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar muat barang, serta perdagangan industri. Indikator yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan Visi Bandar maritim adalah:

1. Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan Sumber Daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar sebagai penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan , pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung:

- 1) Kawasan Distribusi Logistik;
- 2) Kawasan Ekonomi Khusus;
- 3) Kawasan Industri Perikanan Terpadu.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026:

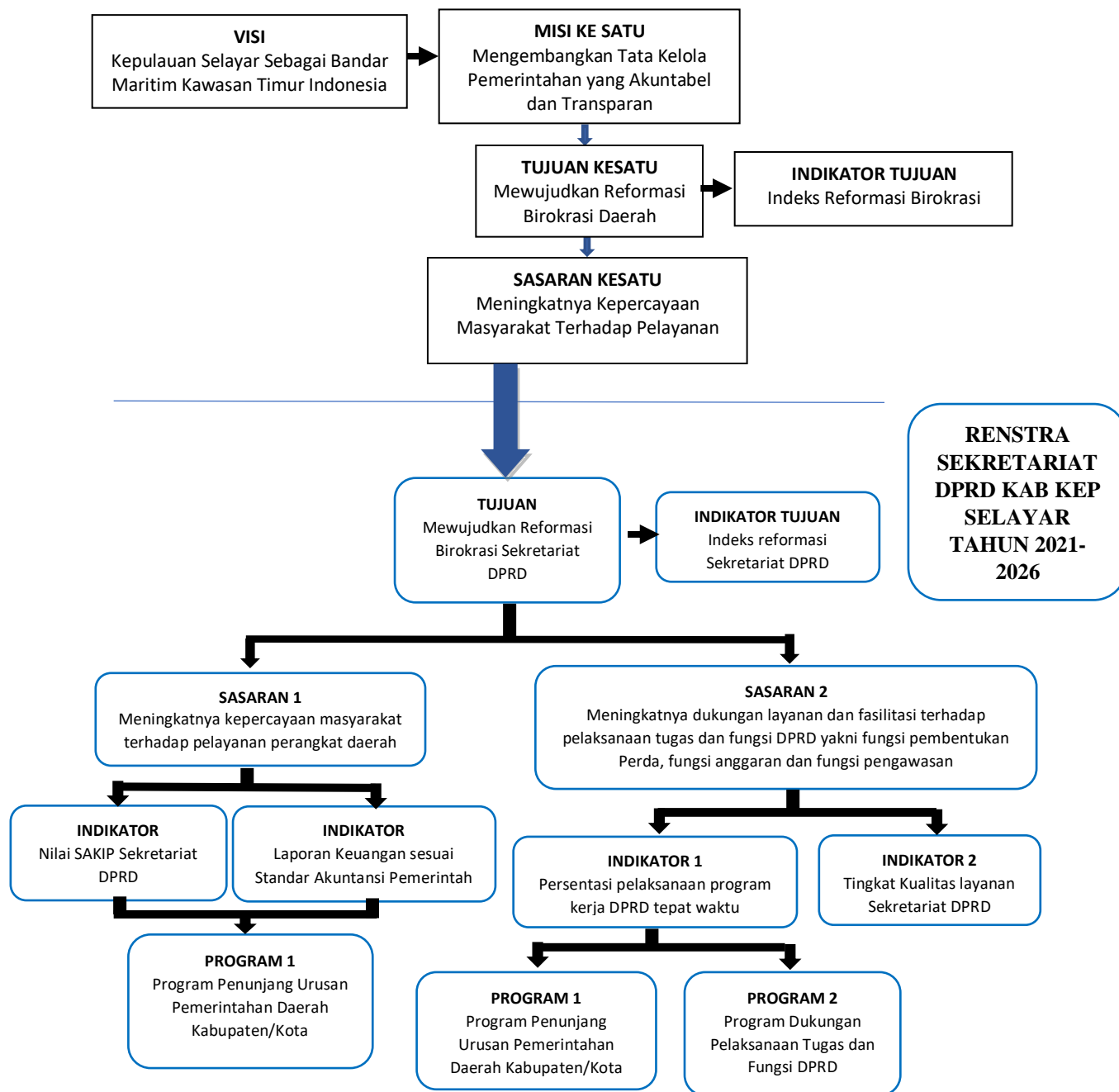
- 1) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan;
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
- 4) Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan (Kemaritiman);
- 5) Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan;
- 6) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berangkat dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 serta berdasarkan tugas pokok fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Renstra mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah yaitu pada misi Ke-1 : “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”.

Berikut cascading Sekretariat DPRD :

Gambar 2.1

**Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2026**



2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Cascading Kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung Tujuan Kesatu (T1), Sasaran kesatu (S1) dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran pada Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan /Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD		Indeks reformasi Sekretariat DPRD	33,89 (C)	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)	76,00 (A)
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		B(60)	B(65)	BB(70)	BB(75)	(A)80
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu		100	100	100	100	100
		Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD		65	70	75	80	85

Sumber : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar 2021-2026

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan perangkat daerah. Strategi dimaksud dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dan kegiatan.

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM yang ditunjang perangkat teknologi informasi	1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan sarana prasarana 3. Peningkatan kualitas SDM
	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	

	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku	
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli 2. Peningkatan system/digitalisasi program kegiatan

Sumber : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2021-2026

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD berdasarkan hasil Renstra Perubahan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				ALASAN FORMULASI/RUMUS HITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Skala Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Inspektorat
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Skala Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Inspektorat

2.	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	%	Jumlah program kerja yang di rencanakan dan jumlah yang terealisasi tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar
		Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	Skala Nilai	Survei oleh Anggota DPRD Kab. Kep Selayar	Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar

Sumber : Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2021
2026

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah. Target kinerja sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan menjadi pertimbangan dan penentu pada saat pengalokasian anggaran. Indikator Kinerja ditentukan dengan berorientasi pada *output* dan *outcome* yang dihasilkan sehingga pada target kinerja dapat diperoleh ukuran keberhasilan dari suatu program, kegiatan ataupun sub kegiatan. Target dan indikator kinerja telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 TAHUN 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) T.A, 2023 tercantum sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan
Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B(65)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya capaian kinerja Sekretariat DPRD	Persentase capaian Kinerja Sekretariat DPRD	100%
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai		Meningkatnya capaian pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Persentase capaian kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	100%
					Meningkatnya Dukungan Pelayanan Administrasi dan Fasilitasi terhadap Tugas DPRD	Persentase capaian Dukungan Pelayanan Administrasi	100%
3	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas dukungan pelayanan terhadap peningkatan kapasitas DPRD dan fungsi pembentukan perda DPRD	Rata rata Persentase keterpenuhan atas layanan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam hal pembentukan Perda dan peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	100%
		Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	70		Meningkatnya Kualitas dukungan pelayanan pelaksanaan tugas fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD	Rata rata Persentase keterpenuhan atas layanan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam fungsi anggaran dan pengawasan	100%

Sumber : Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan
Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis			Program				Kegiatan/ Sub Kegiatan				19	
			Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Indeks reformasi secretariat DPRD	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	64,00 (CC)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan	100%	16.510.149.951	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	196.463.000	SUHERTINA, ST	
		B (65)			Persentase keterpenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok		79.364.000
		Sesuai						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok		11.000.000
								Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA SKPD				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1 Dok		11.000.000
								Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1 Dok		8.000.000
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok		8.000.000

									Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	48.587.000	
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	30.512.000	
									Admnistrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	100%	2.309.366.586	SUHERTINA, ST
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26 Orang/Bulan	2.202.764.586	
									Penyediaan Adminisrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	5.000.000	
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	28.000.000	
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	25.090.000	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	8.660.000	
									Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	16.998.000	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	22.854.000	

										Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah	100%	15.910.000	Hj. RISMALA DEWI, SE
										Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	3.500.000	
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	6.410.000	
										Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	6.000.000	
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	421.000.000	Hj. RISMALA DEWI, SE
										Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dok	10.000.000	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	411.000.000	
										Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	1.018.719.000	Hj. RISMALA DEWI, SE
										Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	15.310.000	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	171.372.000	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	55.040.000	
										Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	40 Paket	49.484.000	
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	46.180.000	

									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap	681.333.000	
									Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	113.678.000	Hj. RISMALA DEWI, SE
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	113.678.000	
									Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100%	653.418.000	Hj. RISMALA DEWI, SE
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	11.132.000	
									Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	284.463.000	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	357.823.000	
									Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	925.257.000	Hj. RISMALA DEWI, SE
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	183.264.000	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	121.152.000	

									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	31.940.000		
									Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	588.901.000		
									Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	10.557.828.365	Hj. RISMALA DEWI, SE	
									Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	10.405.976.365		
									Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100 Paket	151.852.000		
									Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	298.510.000	Hj. RISMALA DEWI, SE	
									Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dok	35.500.000		
									Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Lap	23.010.000		
									Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8 Paket	240.000.000		
			Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD Tersusun dan Terintegrasi Dok Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100%	15.295.056.300	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Layanan dalam Pembahasan Perda (%)	100%	3.651.080.200	ANDI JALALUDDIN AMAR, SH
				Tingkat Kualitas layanan	70		Rata-rata Persentase Keterpenuhan	100%		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dok	220.443.000	
										Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 Dok	3.430.637.200	

						Layanan						
				Sekretariat DPRD		Terhadap Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD dalam Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan Perda						
								Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	686.683.000	MOHAMMAD BASIR, SH
								Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dok	37.000.000	
								Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dok	25.000.000	
								Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	11 Dok	211.400.000	
								Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	11 Dok	190.982.000	
								Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 Dok	222.301.000	
								Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-Rata Persentase Rapat dan Kunjungan Kerja yang teselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	839.925.000	MOHAMMAD BASIR, SH
								Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Lap	189.900.000	
								Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Lap	182.200.000	
								Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Lap	198.600.000	
								Pengawasan urusan	Jumlah Laporan Hasil	15 Lap	81.245.000	

									Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				
									Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Lap	82.200.000		
									Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dok	88.000.000		
									Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dok	2.680.000		
									Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dok	15.100.000		
									Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	1.570.258.000	ANDI JALALUDDIN AMAR, SH	
									Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	78 Dok	808.950.000		
									Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60 Dok	440.000.000		
									Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21 Orang	141.308.000		
									Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60 Orang	180.000.000		
									Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Cakupan Layanan dalam penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	100%	2.440.909.000	MOHAMMAD BASIR, SH	
									Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75 Lap	295.909.000		
									Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dok	2.145.000.000		
									Pelaksanaan dan	Cakupan Layanan dalam	100%	94.250.000	MOHAMMAD	

										pengawasan kode etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik			BASIR, SH
										Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Lap	94.250.000	
										Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	6.011.951.100	Hj. RISMALA DEWI, SE
										Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33 Dok	3.641.394.100	
										Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dok	137.635.000	
										Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dok	2.232.922.000	

Adapun yang menjadi struktur program dan kegiatan yang berkaitan dan menjadi pendukung tercapainya target Kinerja Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2023 sebagaimana berikut.

Tabel 2.6
Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.520.149.951
Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.463.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.319.366.586
Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.910.000
Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	421.000.000
Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	1.018.719.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.678.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.418.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	925.257.000
Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	10.557.828.365
Layanan Administrasi DPRD	298.510.000
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.295.056.300
Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	3.651.080.200
Pembahasan Kebijakan Anggaran	686.683.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	839.925.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	1.570.258.000
Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.440.909.000
Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	94.250.000
Fasilitasi Tugas DPRD	6.011.951.100
Total Anggaran 2023 (APBD Perubahan Tahun 2023)	31.815.206.251

Sumber : DPAP Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2023

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Sekretariat
DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP SKPD	B(65)
2.	Meningkatnya pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Sesuai
3.	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100%
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat	70

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2023

Tabel 2.8

**Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B(65)
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai
2.	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100%
		Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	70

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah merupakan proses pengumpulan data , analisis, dan / atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu atau organisasi. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui hasil / *outcome* yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja pada Sekretariat DPRD didasarkan pada indikator dan target kinerja yang telah tertuang dalam rencana kinerja tahunan dan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa excel via grup *WhatsApp* dan website Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Website Manca yang diatur oleh Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Metode pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Pengukuran Kinerja oleh Penanggung Jawab Sub Kegiatan/Kegiatan

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membagikan Form Pengukuran Kinerja ke masing-masing Penanggung jawab Sub Kegiatan/Kegiatan berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 melalui media komunikasi berbasis *online via whatsapp* dengan format excel yang hasil tiap bulannya dilaporkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk dokumen dan salinannya diserahkan kepada Sub Bagian Program dan Keuangan. Pengukuran Kinerja ini dilakukan secara berkala yaitu Bulanan / Triwulanan / dan Semester. Data Capaian Kinerja disusun berdasarkan hasil dari Form Pengukuran Kinerja oleh penanggung jawab masing-masing yang diserahkan kepada Sub Bagian Program dan Keuangan untuk diolah kembali dan beberapa dokumen pendukung pengukuran kinerja baik dari Inspektorat maupun Sekretariat DPRD sendiri. Pada data capaian kinerja tidak hanya melaporkan terkait kinerja program / kegiatan / sub kegiatan tetapi juga melaporkan pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tiap Bulan/Triwulan/Semester.

Berbeda dengan perhitungan pengukuran kinerja yang hanya merupakan hasil dari bulan tersebut, pada data capaian kinerja merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya dan bulan tersebut. Contoh perhitungan

$$\text{Capaian Kinerja bulan Maret} = \text{R.Kinerja Januari} + \text{R. Kinerja Februari} + \text{R. Kinerja Maret}$$

Data Capaian Kinerja ini kemudian menjadi bahan pada Evaluasi Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Hasil Form Pengukuran Kinerja Bulanan /Triwulanan/Semesteran dan Data Capaian Kinerja Bulanan/Triwulanan/Semesteran (terlampir).

2. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja

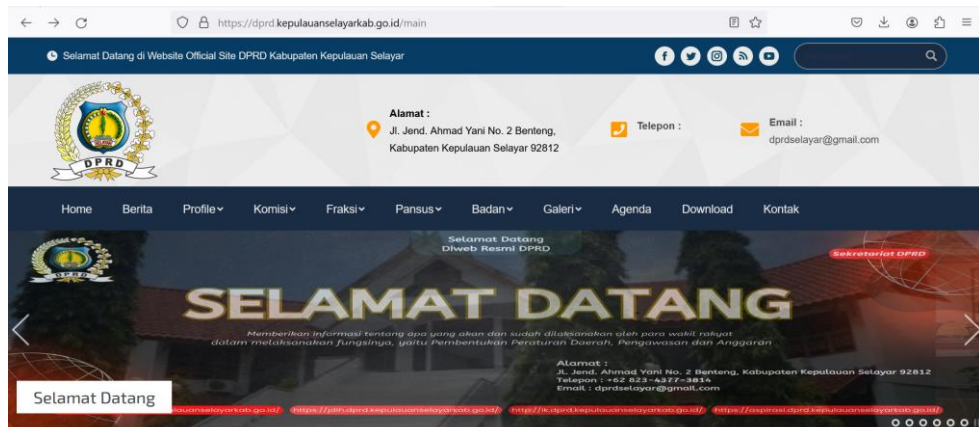
a. SIPEJABAT

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat DPRD adalah aplikasi SIPEJABAT link : <http://sipejabat.kepulauanselayarkab.go.id/login.php> yang mengintegrasikan Rencana Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja capaian kinerja triwulanan.

Kepegawaian Perangkat Daerah		Sekretariat DPRD				
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Melakukan penyelenggaraan administrasi Keuangan, penyediaan pakaian dinas anggota DPRD dan medical check up anggota DPRD	✓	✓	✓	✓
3	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memfasilitasi penyediaan surat menyurat, jasa listrik dan telepon/indihome	✓	✓	✓	✓
4	Administrasi Barang Milik Daerah	Melakukan pengadministrasian Barang Milik Daerah	✓	✓	✓	✓
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Melakukan Pemeliharaan Barang Milik daerah	✓	✓	✓	✓
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melakukan proses pengadaan Barang milik Daerah	✓	✓	✓	✓
7	Layanan Administrasi DPRD	Melakukan Rapat paripurna/ rapat parurna istimewa PAW, memfasilitasi rapat fraksi DPRD, memfasilitasi rapat koordinasi konsultasi DPRD	✓	✓	✓	✓

b. Website Official Site DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

Website Official Site DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar bertujuan untuk menyajikan informasi seputar DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, terkait profil Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar dan agenda yang akan dan telah dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar dalam melaksanakan fungsinya, yaitu Pembentukan Peraturan Daerah, Pengawasan dan Anggaran. Adapun Website Official Site DPRD dapat diakses dengan link : <https://dprd.kepulauanselayarkab.go.id/main> .



Tidak hanya menyajikan informasi, Website Official Site DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar juga menyediakan wadah bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan adanya “*LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat*” yang terdiri dari empat (4) link;



- Survei Kepuasan Layanan untuk mengukur indikator Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD. Survei ini dinilai oleh 25 Anggota DPRD terkait penilaian pelayanan yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD. Survei dapat diakses dengan link : <https://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, E-survey ini telah mengacu kepada permenpan No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



- Jaringan Dokumentasi Hukum, menyajikan informasi produk hukum yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Jaringan Dokumentasi Hukum dapat diakses dengan link : <https://jdih.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/produk/jenis/keputusan-dprd> .
- Sistem Administrasi dan Informasi Rapat (SAIR), menyajikan informasi terkait agenda yang akan dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar. SAIR dapat diakses dengan link : <https://agenda.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/login.php> .
- SAPA Online Aspirasi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat agar mempermudah masyarakat untuk menyampaikan ide aspirasinya. SAPA Online dapat diakses dengan link <https://aspirasi.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/> .

c. Manca (Monitoring Anggaran & Capaian Kinerja)

Aplikasi Manca adalah aplikasi berbasis online sebagai wadah penyajian realisasi anggaran, realisasi kinerja, renja, dan renstra dan data-data lain yang ada pada perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Realisasi di input secara berkala per triwulan dan semester oleh masing-masing perangkat daerah, dan diatur oleh Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≥	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi,

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{*})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

B. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Penilaian terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilandaskan pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Dalam perjanjian kinerja berupa indikator kinerja dan target kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Analisis Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023			
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE
2	3	4	7	8	9	10
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	<u>Indikator:</u> Nilai SAKIP Sekretariat DPRD <u>Meta Indikator:</u> Hasil Nilai SAKIP dari Inspektorat	Skala Nilai	B (65)	B (61,35)	94,38%	Sangat Tinggi
	<u>Indikator:</u> Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah <u>Meta Indikator:</u> Hasil Penilaian Laporan Keuangan Oleh Inspektorat	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	Sangat Tinggi

Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	<u>Indikator:</u> Persentase pelaksanaan Program kerja DPRD tepat waktu <u>Meta Indikator:</u> Realisasi Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah + Realisasi Program Pengembangan Regulasi Daerah + Realisasi Program _____ X 100% 3	%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	<u>Indikator:</u> Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD <u>Meta Indikator:</u> Hasil Survei oleh Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar	Nilai	70	80	114%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2023

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah

Realisasi capaian sasaran 1 yakni *“Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah”*.

Tabel 3.3

Target dan Realisasi kinerja tahun 2023

SASARAN 1					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Hasil Nilai SAKIP dari Inspektorat	B (65)	B (61,35)	94,38%
	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Oleh Inspektorat	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2022

- a. Indikator pertama yakni Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dengan capaian indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD untuk tahun 2023 berdasarkan Surat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar No. 021/REV-LAKIP/II/2023/ITDA memperoleh nilai B (61,35) dengan kategori *“Baik”*. Namun pada tahun ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, Adapun beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu:

- Perencanaan Kinerja :
 - Dokumen Resntra belum menetapkan hal-hal yang seharusnya

ditetapkan;

- Dalam perencanaan kinerja belum menyajikan IKU; dan
 - Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- Pengukuran Kinerja :
 - Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulan/triwulan/semester); dan
 - Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
 - Pelaporan Kinerja :
 - Tidak/belum ditemukan masalah yang mendasar.
 - Evaluasi Internal :
 - Tidak/belum ditemukan masalah yang mendasar.
 - Pencapaian Kinerja :
 - Tidak/belum ditemukan masalah yang mendasar.

Tabel 3.4

**MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP SEKRETARIAT DPRD
TA 2022**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggungjawab	Status / Progres Penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja Agar Dalam Dokumen Renstra menetapkan hal hal yang seharusnya ditetapkan demi mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra dengan mengacu kepada permendagri 86 tahun 2017	Kasubag program dan Keuangan Setwan	100%
2	Agar dalam perencanaan kinerja dapat menyajikan IKU untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa mendatang	Menyempurnakan Perencanaan Kinerja dengan menyajikan IKU pada dokumen Perencanaan Kinerja	Kasubag program dan Keuangan Setwan	100%
3	Agar Rencana Kerja Tahunan/Rencana kerja dapat dimanfaatkan	Melakukan Penyelarasan Renja dengan RKA	Kasubag program dan Keuangan Setwan	100%

	dalam penyusunan anggaran			
4	Pengukuran Kinerja Agar pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan Teknologi infomasi Agar Pengumpulan Data Kinerja atas rencana aksi dapat dilakukan secara berkala	Mengembangkan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia saat ini yakni “SIPEJABAT” dan Indeks Kepuasan DPRD Mengeluarkan form pengukuran kinerja secara berkala kepada semua PPTK	Kasubag program dan Keuangan Setwan Kasubag program dan Keuangan Setwan	0% 100%

Pada tahun ini Sekretariat DPRD telah berupaya untuk melaksanakan semua rekomendasi dari Inspektorat.

Perbandingan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 , 2022 dan periode akhir renstra sabagai berikut :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi kinerja Tahun Sebelumnya 2021

SASARAN 1								
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	2021			2022		
			target	realisasi	capaian	Target	realisasi	Capaian
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Hasil Nilai SAKIP dari Inspektorat	B (60)	CC (58,33)	97,21 %	B (65)	B (61,35)	94,38 %

Dengan rincian komponen sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi Tahun 2022	Hasil Evaluasi Tahun 2021
A	Perencanaan Kinerja	30	19,19	19,04
B	Pengukuran Kinerja	25	12,81	12,81
C	Pelaporan Kinerja	15	9,70	9,70
D	Evaluasi Internal	10	4,65	4,65
E	Pencapaian Kinerja	20	15,00	12,12
Jumlah		100	61,35	58,33

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Tabel 3.6

Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun terhadap capaian periode akhir Renstra

SASARAN 1						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	2022		2026	
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Hasil Nilai SAKIP dari Inspektorat	target	realisasi	target	Tingkat capaian
			B (60)	58,33	A (76)	76,75 %

- b. Indikator Kedua dengan indikator Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah untuk realisasi tahun. Berikut realisasi sasaran strategis 1 dengan dengan indicator Laporan keuangan yang sesuai SAP .

Tabel 3.7

Target dan Realisasi kinerja tahun 2023

SASARAN 1					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Oleh Inspektorat	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2022

Data capaian ini dapat dilihat dari opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dinilai oleh BPK.

Sasaran 1 : didukung dengan pencapaian target 2 Program yang terdiri dari 42 Sub Kegiatan. Berikut nilai realisasi dan capaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran 1.

Tabel 3.8

Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Pendukung Sasaran 1

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	100%	100%	100%
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5	5	100%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26/bulan	26/bulan	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%
Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29	29	100%
Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200	200	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40	40	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	36	100%
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	13	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37	37	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	100%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	100%
Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 orang/ bulan	25 Orang/ bulan	100%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100	100	100%
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	12	12	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8	8	100%

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8	8	100%
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	100%	100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33	33	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10	10	100%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50	50	100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	100%	100%
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	78	78	100%

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2023

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan oleh:

- a. Sasaran 1 didukung oleh 2 program dan 42 sub kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi dan capaian 100%, meskipun terdapat 1 sub kegiatan yakni Fasilitasi Fraksi DPRD direfocusing karena mempertimbangkan keadaan anggaran dan kepentingan pelaksanaan sub kegiatan;
- b. Nilai SAKIP SKPD Tahun 2022 dengan kategori kurang atau predikat B (61,35) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP;
- c. Laporan Keuangan yang sesuai SAP tahun 2023 telah sesuai SAP dan mencapai target.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terdiri dari dua Indikator kinerja dengan tolak ukur capaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Sasaran 2

SASARAN 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	Realisasi Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah + Realisasi Program Pengembangan Regulasi Daerah + Realisasi Program <hr style="width: 100%; margin: 0;"/> 3	100%	100%	100%
	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	Hasil Kualitas layanan Sekretariat DPRD oleh Anggota DPRD	70	80	114%

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2023

Adapun yang menjadi penjelasan pada setiap indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebagai berikut.

a. Indikator 1 : Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu

Data Dukung Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu

Dalam melaksanakan tiga fungsi DPRD yakni, fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dsan Fungsi Pengawasan , DPPD telah menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dengan 3 program utama yakni :

- a. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Program Pengembangan Regulasi Daerah;
- c. Program Peningkatan Kehumasan DPRD.

Ketiga program Kerja DPRD tersebut diatas selanjutnya kami selaraskan / intergrasikan ke dalam program program kerja Sekretariat DPRD yaitu pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD (permendagri 90 tentang tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah) Berikut pengintergrasian dan penyelarasan Program kerja DPRD ke dalam Program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar .

Tabel 3.10

**PENYELARASAN / PENGINTEGRASIAN PROGRAM KERJA DPRD
KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN SEKRETARIAT DPRD TA 2023**

No	Program Kerja DPRD			Program Kerja Sekretariat DPRD		Target / Tahapan pelaksanaan
1.	Program : Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Workshop, Seminar , Lokakarya Pelatihan	Program : dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub.Kegiatan : - Orientasi DPRD/ Bimbingan Teknis DPRD/ Pendalaman Tugas DPRD	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)
		Kegiatan : Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi	- Rapat Fraksi, - Penyusunan Pandangan Umum dan Penyiapan Rekomendasi Fraksi	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan : Layanan Admnistrasi DPRD Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)
				Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan : - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)
		Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Anggaran	- Rapat Kerja/Intern Pembahasan KUA PPAS Pokok dan perubahan, - Rapat Kerja/Intern Pembahasan APBD Pokok dan perubahan, - Rapat Koordinasi/ konsultasi - Harmonisasi pokok-pokok pikiran DPRD	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub kegiatan : - Pembahasan KUA PPAS - Pembahasan KUA PPAS Perubahan - Pembahasan APBD - Pembahasan APBD Perubahan	MingguII juli s/d Minggu II Agustus Minggu I s/d minggu II Agustus Minggu II September s/d 31 Desember Minggu II sept s/d 31

			- Evaluasi APBD/APBD Perubahan		- Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD	oktober Triwulan II (Berdasarkan permnedagri 82 tahun 2023)
	Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan	- Rapat Kerja / Intern pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan perda dan pergub, pengawasan kebijakan dan pemerintahan daerah , dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai bidang tugas dari komisi-komisi - Melakukan Kunjungan kerja/konsultasi terkait hasil rapat terhadap fungsi pengawasan tersebut	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam - Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK - Pengawasan Penggunaan Anggaran - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Tentative sesuai permintaan sda sda sda sda sda sda sda Triwulan I	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan (Pimpinan, Bamus, dan badan kehormatan)	- Rapat Komisi (Internal/Kerja) - Rapat Badan Musyawarah - Rapat Badan Kehormatan - Rapat koordinasi konsultasi DPRD - Kunjungan Kerja /	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah - Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD Kegiatan : Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)	

			koordinasi konsultasi		Sub Kegiatan : -Pengawasan Kode Etik DPRD	
2	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Legislasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan pembahasan draft produk hukum inisiatif, - memfasilitasi bapemperda dalam membuat kajian kelayakan sebuah perda untuk dibahas - Penyusunan serta pengelolaan Program Pembentukan Perda. - Pembahasan Rancangan Perda dalam rapat-rapat, hearing dengan pakar, konsultasi dan kunjungan kerja sesuai dengan jadwal bamusy dan tata tertib 	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan : Peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 	<p>Triwulan II (sebelum penetapan APBD (permndagri no. 80 tahun 2015 tentang pemebntukan produk hokum daerah</p> <p>Triwulan II dan III (tentative sesuai permintaan)</p> <p>Tentatif sesuai pembahasan ranperda</p>
3	Program Peningkatan Kehumasan DPRD	Kegiatan : Pemberitaan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalin Kemitraan dengan stakeholder, media elektronik maupun cetak untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD 	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi dan Dokumentasi Dewan 	Januari s/d Desember
		Kegiatan : Penyelenggaraan Representasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan reses - Kegiatan ini dilaksanakan melalui 	Program Dukungan Pelaksanaan	Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	

		Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	<p>kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kecamatan, pertemuan/ /diskusi dengan</p> <p>- Masyarakat terkait di penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD melalui kegiatan hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan unjuk rasa.</p>	Tugas dan Fungsi DPRD	<p>Sub Kegiatan</p> <p>- Pelaksanaan Reses</p> <p>- Kunjungan Kerja dalam daerah</p>	<p>Reses I : Jan s/d April</p> <p>Reses II : Mei s/d Agust</p> <p>Reses III : Sept s/d Des</p>
--	--	-----------------------------------	---	-----------------------	---	--

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 indikator 1

	Program Kerja DPRD	Program Kerja Sekretariat DPRD		Target pelaksanaan	Realisasi	Tkt Capaian	Sumber data
1.	Program : Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program : dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub.Kegiatan : - Orientasi DPRD/ Bimbingan Teknis DPRD/ Pendalaman Tugas DPRD	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)	Januari s/d Desember	Tepat waktu	Bag.umum dan Keu
		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan : Layanan Admnistrasi DPRD Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)	Tidak terlaksana	(refocusing Kegiatan)	
		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan : - Penyediaan Tenaga Ahli Fraki	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)	Januari s/d Desember	Tepat waktu	Bag.Persd.& Perundang- undangan
		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub kegiatan : - Pembahasan KUA PPAS - Pembahasan KUA PPAS Perbha - Pembahasan APBD - Pembahasan APBD Perubahan - Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD	(Berdasarkan permnedagri 82 tahun 2023) Minggu II juli s/d Mingu II Agus Minggu I s/d minggu II Agustus Minggu II September s/d 31 Des Minggu II sept s/d 31 oktober Triwulan II	20 Juli s/d 03 Agust 4 agust s/d 11 Agust 16 Okt s/d 15 Des 20 sept s/d 29 Sept Apri s/d Mei	Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu	Bag.Fasilitasi Pengawasan & Penganggara

		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam - Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK - Pengawasan Penggunaan Anggaran - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 	Jan s/d Des (Tentative) sda sda sda sda sda sda Triwulan I s/d triwulan II	Januari s/d des (sesuai permintaan) Januari s/d des (sesuai permintaan) Januari s/d des (sesuai permintaan) Januari s/d des (sesuai permintaan) Januari s/d des (sesuai permintaan) Januari s/d des (sesuai permintaan) Januari s/d des (sesuai permintaan) Januari s/d des (sesuai permintaan) Januari s/d des (sesuai permintaan) 24 Maret s/d 10 April	Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu	Bag. Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah 	Jan s/d Des (tentative) sda	Januari s/d des (sesuai permintaan)	Tepat waktu Tepat waktu	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran

			- Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD Kegiatan : Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan : -Pengawasan Kode Etik DPRD	sda sda sda		Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu	
2	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan : - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan : Peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Triwulan II (sebelum penetapan APBD (permndagri no. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah Triwulan II dan IV (tentative) Tentatif sesuai pembahasan ranperda	11 s/d 13 Desember April s/d 18 Des April s/d 18 Des	Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu	Bag. Persidangan dan perundang-undangan
3	Program Peningkatan Kehumasan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan - Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Januari s/d Desember	Jan s/d Des	Tepat waktu	Bag. Persd.& Perundang-undangan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan	Reses I : Jan s/d April	Reses I : 26 Jan s/d	Tepat waktu	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan

		Fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Reses - Kunjungan Kerja dalam daerah 	Reses II : Mei s/d Agust Reses III : Sept s/d Des	31 Jan Reses II : 2 Mei s/d 7 Mei Reses III : 6 Sept s/d 11 Set	Tepat waktu Tepat waktu	Penganggaran
--	--	-------------	---	--	---	----------------------------	--------------

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh program kerja DPRD yang telah diintegrasikan ke dalam program kerja Sekretariat DPRD dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan capaian 100 %.

Realisasi kinerja pada indikator kedua sasaran 3 yakni persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD yakni :

- Pendalaman Tugas DPRD;
- Fasilitasi Fraksi DPRD (Refocusing);
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- Pembahasan KUA PPAS;
- Pembahasan KUA PPAS Perubahan;
- Pembahasan APBD;
- Pembahasan APBD Perubahan;
- Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD;
- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum;
- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK;
- Pengawasan Penggunaan Anggaran;
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah;
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
- Pengawasan Kode Etik DPRD;

Formulasi pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$R : \frac{\text{Total Realisasi Sub Kegiatan}}{\text{Total Target Sub Kegiatan}}$$

$$: \frac{78+60+10+10+11+11+10+15+15+15+15+15+5+5+5+33+10+50+5}{78+60+10+10+11+11+10+15+15+15+15+15+5+5+5+33+10+50+5}$$

$$: \frac{393}{393} = 100\%$$

Catatan :

- Rumus Realisasi menggunakan rumus Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dengan nilai yang diperhitungkan yakni hasil pelaksanaan sub kegiatan pada Program Kerja Sekretariat DPRD yang mendukung dan memberikan pelayanan terhadap

pelaksanaan Program Kerja DPRD.

- Realisasi Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang didukung oleh 21 sub kegiatan dengan 1 sub kegiatan telah difocusing dengan perolehan capaian 100% dari target yang telah ditentukan;
- Adapun sub kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD yang difocusing karena mempertimbangkan keadaan anggaran dan kepentingan pelaksanaan sub kegiatan/kegiatan.

b. Program Pengembangan Regulasi Daerah;

Program ini di dukung oleh :

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.

Formulasi pengukurannya adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi : $\frac{\text{Total Realisasi Sub Kegiatan}}{\text{Total Target Sub Kegiatan}}$

$$: \frac{5+30+21}{5+30+21}$$

$$: \frac{56}{56} = 100\%$$

Realisasi hasil integrasi program kerja Sekretariat DPRD memperoleh nilai 100% karena telah mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Regulasi Daerah sesuai dengan target yang telah terlaksana pada tahun 2023. Selain dari pada realisasi program kerja Sekretariat DPRD, perlu diketahui output dari Program Pengembangan Regulasi Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Legislasi berupa Peraturan Daerah. Berikut daftar Ranperda pada tahun 2023 yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah:

Tabel 3.12

Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda Yang Ditetapkan Tahun 2023

NO.	Nama Ranperda	Status Penetapan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.	Ditetapkan TA 2023	-
2.	Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2023.	Ditetapkan TA 2023	-

3.	Ranperda tentang APBD TA 2024.	Ditetapkan TA 2023	-
4.	Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Ditetapkan TA 2023	-
5.	Ranperda tentang Pembinaan dan Penguatan Ideologi Pancasila di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.	Dibatalkan Oleh Pemda	Dibatalkan oleh Pemda Kab. Kep. Selayar Ranperda dan Naskah akademik tidak siap
6.	Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042.	Tidak Ditetapkan tahun 2023	Belum siap karena keterbatasan Anggaran Tahun 2023
7.	Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.	Dibatalkan Oleh Pemda	Dibatalkan oleh Pemda Kab. Kep. Selayar Ranperda dan Naskah akademik tidak siap
8.	Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Ditetapkan TA 2023	-
9.	Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.	Dibatalkan Oleh Pemda	Dibatalkan oleh Pemda Kab. Kep. Selayar Ranperda dan Naskah akademik tidak siap
10.	Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	Ditetapkan TA 2023	-
11.	Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanadoang.	Ditetapkan TA 2023	-
12.	Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.	Ditetapkan TA 2023	-
13.	Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah.	Ditetapkan TA 2023	-
14.	Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034.	Ditetapkan TA 2023	-
15.	Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan Daerah.	Ditetapkan TA 2023	-
16.	Ranperda tentang Rencana Induk Perkeretaapian Daerah Tahun 2023-2043.	Dibatalkan Oleh Pemda	Dibatalkan oleh Pemda Kab. Kep. Selayar Ranperda dan Naskah akademik tidak siap

Catatan :

- Realisasi menggunakan rumus Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dengan nilai yang diperhitungkan yakni hasil pelaksanaan sub kegiatan pada Program Kerja Sekretariat DPRD yang mendukung dan memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan Program Kerja DPRD;
- Realisasi Program Pengembangan Regulasi Daerah yang didukung oleh 3 sub kegiatan diperoleh nilai 100% dari target yang telah ditentukan.

- Output dari Program Pengembangan Regulasi Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Legislasi TA 2023 berupa 11 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan TA 2023, 4 Ranperda dibatalkan oleh Pemda, dan 1 Ranperda yang belum ditetapkan pada TA 2023.

c. Program Peningkatan Kehumasan DPRD:

Program ini di dukung oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD yakni :

- Publikasi dan dokumentasi dewan;
- Pelaksanaan reses;
- Kunjungan kerja dalam daerah.

Realisasi : $\frac{\text{Total Realisasi Sub Kegiatan}}{\text{Total Target Sub Kegiatan}}$

$$: \frac{60+75+75}{60+75+75}$$

$$: \frac{210}{210} : 100\%$$

Catatan :

- Realisasi menggunakan rumus Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dengan nilai yang diperhitungkan yakni hasil pelaksanaan sub kegiatan pada Program Kerja Sekretariat DPRD yang mendukung dan memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan Program Kerja DPRD;
- Realisasi Program Peningkatan Kehumasan DPRD yang didukung oleh 3 sub kegiatan diperoleh nilai 100% dari target yang telah ditentukan.

Dari perhitungan di atas, diperoleh penjelasan terhadap Indikator dua, yakni Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu sebagai berikut.

1. Bahwa semua program kerja DPRD yang telah direncanakan dalam Renja DPRD terlaksana dan direlaisasikan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan . Realisasi dan Capaian indikator Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu diperoleh nilai 100%, keberhasilan ini didukung oleh komitmen dan kerja sama Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dan pihak lainnya yang terlibat

- dalam pelaksanaan Program Kerja DPRD;
2. Adapun sub kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD yang difocusing karena mempertimbangkan keadaan anggaran dan kepentingan pelaksanaan sub kegiatan/kegiatan.
 3. Pada Program Pengembangan Regulasi Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Pembentukan Perda T.A, 2023 dari 16 Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dibahas T.A. 2023 terdapat 11 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan T.A. 2023, 4 Ranperda dibatalkan oleh Pemda karena Ranperda dan Naskah Akademik belum siap, dan 1 Ranperda yang tidak ditetapkan pada T.A. 2023 yakni Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 karena Ranperda masih perlu untuk melakukan koordinasi ke beberapa kementetrian sebelum disahkan sementara anggaran pada T.A. 2023 belum mampu untuk mengakomodir sehingga untuk koordinasi dimaksud baru di usulkan pada T.A. 2024, namun secara umum program kerja DPRD telah dilaksanakan secara tepat waktu.

b. Indikator 2 : Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

Data Dukung Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

Tabel 3.13
Penilaian Quisisioner Survey Tingkat Kualitas Layanan
Sekretariat DPRD

No	Pernyataan	Skala Penilaian Responden 25 Anggota Dewan				
		SP	P	KP	TP	STP
Dukungan Sumber Daya Manusia						
1	Kompetensi dan Profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan	0	25	0	0	0
2	Inisiatif, komunikatif, dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan dewan	0	25	0	0	0
3	Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja diluar jam kerja	0	25	0	0	0
4	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan menyiapkan materi persidangan	0	25	0	0	0
5	Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja diluar jam kerja	0	25	0	0	0
Pelayanan Alat Kelengkapan						
6	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	0	25	0	0	0
7	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	0	25	0	0	0
8	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	0	25	0	0	0

9	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan dinas	0	25	0	0	0
Pelayanan Kesehatan						
10	Komunikasi dan informasi mengenai adanya fasilitas kesehatan dewan	25	0	0	0	0
11	Komunikasi dan informasi hasil pelayanan kesehatan	25	0	0	0	0
Penyediaan Sarana dan Prasarana						
12	Keramahan, Kecepatan dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPR)	0	25	0	0	0
13	Kualitas ruang kerja anggota	0	15	10	0	0
14	Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD	0	5	20	0	0
15	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, lift, dan alat pendingin)	0	0	10	15	0
Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan						
16	Fasilitas pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD	0	25	0	0	0
17	Publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat		25	0	0	0
18	Fasilitasi tamu-tamu DPRD	0	25	0	0	0
Pelayanan Persidangan dan Risalah						
19	Fasilitasi kegiatan hearing dan resepsionis	0	25	0	0	0
20	Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, rapat paripurna istimewa dan koordinasi pelantikan anggota DPRD	0	25	0	0	0
21	Fasilitasi Penyediaan akomodasi (jamuan, tempat, sound system) kegiatan rapat DPRD	0	5	20	0	0
Pelayanan Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian						
22	Fasilitasi bahan rancangan penyusunan naskah akademik dan ranperda prakarda DPRD	0	25	0	0	0
23	Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli fraksi DPRD	0	25	0	0	0
24	Kajian dan fasilitas gugatan hukum terhadap DPRD	0	25	0	0	0
Pelayanan Bagian Keuangan						
25	Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD	25	0	0	0	0
26	Komunikasi dan informasi mengenai hak-hak DPRD	25	0	0	0	0
27	Penyusunan/perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD	0	25	0	0	0
Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan		100	500	60	15	0

Sumber : <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, diakses pada Januari 2023

Keterangan :

- SP : Sangat Puas
- P : Puas
- KP : Kurang Puas
- TP : Tidak Puas
- STP : Sangat Tidak Puas
- Skor Nilai SP : 5
- Skor Nilai P : 4
- Skor Nilai KP : 3
- Skor Nilai TP : 2
- Skor Nilai STP : 1
- **25 Anggota Dewan x 27 Pernyataan : 675 Jawaban**

Tabel 3.14
Perhitungan Penilaian Quisisioner Survey Tingkat Kualitas Layanan
Sekretariat DPRD

Penilaian	Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan	Skor	Total Skor
1	2	3	4 = 2x3
Sangat Puas	100	5	500
Puas	500	4	2000
Kurang Puas	60	3	180
Tidak Puas	15	2	30
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total	675		2710

Sumber : <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, diakses pada Januari 2023

Keterangan

Y : Skor Tertinggi x Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan

Y : 5 x 675 = 3.375

Rumus Tingkat Kualitas Layanan: $\frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2710}{3.375} \times 100 \\
 &= 80
 \end{aligned}$$

Adapun yang menjadi catatan dari Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terkait kepuasan Anggota DPRD, yakni:

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana
 - a. Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang AKD
 - Adanya ruangan yang bocor ketika musim hujan
 - b. Kualitas Sarana Pendukung (Toilet, Taman, Lift, dan Alat Pendingin
 - Mushola perlu dilakukan perbaikan agar memberikan kemudahan beribadah saat pelaksanaan tugas Anggota DPRD;
 - Ketersediaan air masih kurang.
- 2) Pelayanan Persidangan dan Risalah
 - a. Jamuan makan dan minum disesuaikan dengan selera Anggota DPRD.

Dari perhitungan dan penjelasan di atas, diperoleh analisis terhadap Indikator 1 yakni Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD sebagai berikut.

- Realisasi dan Capaian indikator Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Tahun 2023 diperoleh nilai 80 dengan persentase capaian dari target adalah 114% yang diperoleh dari hasil survey yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD melalui website <https://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/> yang dapat diakses oleh 25 Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Responden Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD adalah 25 orang Anggota DPRD Kab. Kep Selayar atas 27 pernyataan sehingga diperoleh total 675 jawaban bervariasi dengan skala penilaian Sangat Puas dengan skor 5, Puas dengan Skor 4, Kurang Puas dengan skor 3, Tidak Puas dengan skor 2, dan Sangat Tidak Puas dengan skor 1. Dari Tabel 3.10 di atas diperoleh angka bahwa dari 25 Anggota DPRD Kab Kep. Selayar dengan 27 pernyataan diperoleh 675 jawaban dengan penilaian yakni 125 Jawaban Sangat Puas, 448 Jawaban Puas, 87 Jawaban Kurang Puas dan 15 jawaban Tidak Puas. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja indikator pertama sasaran kedua disebabkan oleh:
 - Dengan perolehan 125 Jawaban Sangat Puas, 448 Jawaban Puas, 87 Jawaban Kurang Puas dan 15 jawaban Tidak Puas oleh Anggota DPRD Kab. Kep Selayar atas 27 pernyataan yang diberikan, hal ini diperoleh dengan komitmen, kerjasama, konsistensi dan masukan dari berbagai pihak.
 - Adapun yang menjadi penyebab dari jawaban kurang puas dan tidak puas yakni terkait kondisi sarana dan prasarana serta pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran pada TA 2023 sehingga diharapkan pada tahun berikutnya keterbatasan ini dapat diatasi.
 - Peningkatan nilai pada tahun sebelumnya yakni pada bagian Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan dengan mulai berbenah dengan menghadirkan website berbasis online yakni Website Official Site DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai wadah penyajian informasi dan pengaduan layanan masyarakat kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan link : <https://dprd.kepulauanselayarkab.go.id/main> .

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi pada tahun sebelumnya

SASARAN 2								
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	2023			2022		
			Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	Realisasi Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah + Realisasi Program Pengembangan Regulasi Daerah + $\frac{X}{3}$ Realisasi Program 100%	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD oleh Anggota DPRD	70	80	114	65	77	118

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2022

Berdasarkan table tersebut diatas kami dapat jelaskan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indicator kedua (tingkat kulitas layanan sekretarit DPRD) selalu melebihi target setiap tahunnya,

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi sampai pada akhir periode renstra

SASARAN 2						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	2023		2026	
			Target	Realisasi	Target	Tingkat Cap (%)
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	Realisasi Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah + Realisasi Program Pengembangan Regulasi Daerah + $\frac{X}{3}$ Realisasi Program 100%	100	100	100	100
	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD	70	80	85	94,11

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2023

Berdasarkan table tersebut diatas kami dapat jelaskan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indicator kedua (tingkat kulitas layanan sekretarit DPRD) pada tahun ke dua periode renstra ,

sudah mencapai 94,11 %

Sasaran 1 didukung dengan pencapaian target 2 Program yang terdiri dari 42 Sub Kegiatan. Berikut nilai realisasi dan capaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran 1.

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan
Pendukung Sasaran 1

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	100%	100%	100%
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5	5	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26/bulan	26/bulan	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	1	100%

	Akhir Tahun SKPD			
Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29	29	100%
Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200	200	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40	40	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	36	100%
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	13	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%

Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37	37	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	100%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	100%
Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 orang/ bulan	25 Orang/ bulan	100%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100	100	100%
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	12	12	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8	8	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8	8	100%
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	100%	100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33	33	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10	10	100%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50	50	100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	100%	100%
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	78	78	100%

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2023

C. Realisasi Keuangan

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran TA 2023 Berdasarkan Peruntukannya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	REALISAI (%)	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B (65)	B (61,35)	94,38 %	21.021.684.465	20.881.708.609	99,33 %
	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai	Sesuai	100%	2.319.366.586	2.292.190.828	98,83 %
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100%	100%	100%	8.474.155.200	8.376.440.500	98,85 %
	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	70	80	114%			
Total Anggaran					31.815.206.251	31.550.339.937	99,17 %

Sumber : RFK Bulan Desember Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2023

Tabel 3.19

Capaian Realisasi Anggaran TA 2023 Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.520.149.951	16.370.892.629	99%
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	196.463.000	188.224.400	96%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.364.000	77.825.400	98
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.000.000	10.633.000	97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	11.000.000	8.312.000	76
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	8.000.000	7.460.000	93
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	8.000.000	7.315.000	91
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	48.587.000	46.732.000	96
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.512.000	29.947.000	98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.319.366.586	2.292.190.828	99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.212.764.586	2.189.030.228	99
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	4.751.000	95
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	28.000.000	27.497.000	98
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	25.090.000	24.648.000	98

SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.660.000	7.250.000	84
Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.998.000	16.372.600	96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	22.854.000	22.642.000	99
Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.910.000	14.569.000	92
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.500.000	3.500.000	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	6.410.000	5.634.000	88
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	6.000.000	5.435.000	91
Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	421.000.000	420.394.686	100
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	9.818.000	98
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	411.000.000	410.576.686	100
Admnistrasi Umum Perangkat daerah	1.018.719.000	1.017.591.986	100
Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan	15.310.000	14.868.000	97
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	171.372.000	171.372.000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.040.000	55.040.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	49.484.000	49.428.000	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.180.000	45.980.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	681.333.000	680.903.986	100
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	113.678.000	109.426.000	96
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.678.000	109.426.000	96
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	653.418.000	650.814.085	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.132.000	10.973.000	99
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	284.463.000	282.900.463	99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.823.000	356.940.622	100
Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	925.257.000	893.731.650	97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Jabatan	183.264.000	168.194.750	92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	121.152.000	106.001.000	87
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.940.000	31.730.000	99
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	588.901.000	587.805.900	100
Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	10.557.828.365	10.502.367.994	99
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.405.976.365	10.353.047.994	99
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	151.852.000	149.320.000	98
Layanan Administrasi DPRD	298.510.000	281.582.000	94
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	35.500.000	30.857.000	87
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	23.010.000	21.236.000	92
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	240.000.000	229.489.000	96
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI DPRD	15.295.056.300	15.179.447.308	99%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.651.080.200	3.650.813.700	100
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	220.443.000	220.308.400	100

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.430.637.200	3.430.505.300	100
Pembahasan kebijakan anggaran	686.683.000	657.755.800	96
Pembahasan KUA dan PPAS	37.000.000	34.230.000	93
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.000.000	22.338.000	89
Pembahasan APBD	211.400.000	204.377.600	97
Pembahasan APBD Perubahan	190.982.000	181.809.600	95
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	222.301.000	215.000.600	97
Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	839.925.000	814.155.700	97
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum	189.900.000	185.971.500	98
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur	182.200.000	178.086.500	98
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	198.600.000	192.618.500	97
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	81.245.000	80.046.600	99
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	82.200.000	76.771.800	93
Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	88.000.000	85.795.800	97
Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.680.000	755.000	28
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	15.100.000	14.110.000	93
Peningkatan Kapasitas DPRD	1.570.258.000	1.529.087.850	97
Pendalaman Tugas DPRD	808.950.000	798.381.850	99
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	440.000.000	439.900.000	100
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	141.308.000	131.506.000	93
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000	159.300.000	89
Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	2.440.909.000	2.439.088.500	100
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	295.909.000	294.088.500	99
Pelaksanaan Reses	2.145.000.000	2.145.000.000	100
Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	94.250.000	83.920.800	89
Pengawasan Kode Etik DPRD	94.250.000	83.920.800	89
Fasilitasi Tugas DPRD	6.011.951.100	6.004.624.958	100
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.641.394.100	3.637.590.552	100
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	137.635.000	135.791.000	99
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.232.922.000	2.231.243.406	100
Total	31.815.206.251	31.550.339.937	99,17

Sumber : RFK Bulan Desember Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2023

Realisasi anggaran T.A. 2023 cukup tinggi yakni 99% dengan perolehan realisasi sub kegiatan masing-masing rata-rata mencapai 99%. Adapun sub kegiatan yang mengalami refocusing anggaran yakni fasilitasi fraksi DPRD dengan pertimbangan fasilitasi fraksi DPRD dapat diefisiensikan dengan rapat lainnya sehingga anggaran difokuskan kembali untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan.

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar tahun 2023 memiliki 2 sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah dengan dua Indikator yakni indikator nilai SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 yakni kategori baik atau predikat B (61,35) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP, indikator kedua yakni Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah telah sesuai SAP dan mencapai target;
 - b. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dengan dua indikator yakni Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu memperoleh realisasi 100% telah memenuhi target dengan kriteria realisasi sangat tinggi dan menghasilkan 11 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan T.A. 2023. Indikator Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap layanan Sekretariat telah memenuhi target dengan nilai 80 dengan persentase capaian 114% dengan kategori sangat tinggi,
2. Realisasi anggaran sebesar Rp 31.550.339.937 atau 99,17%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 264.866.314 atau 0,83%.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- a. Penyediaan anggaran yang memadai secara bertahap untuk dapat mengakomodir masukan Anggota DPRD dari Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD dan LHE SAKIP;
- b. Penyediaan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan formasi bidang tugas yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap DPRD;
- c. Intensif dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait pelayanan kepada Anggota DPRD dan menjalin komunikasi yang baik dengan Anggota DPRD.

